

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

- Abdurrahman. 2006, Kinerja Sistem Lumpur Aktif pada Pengolahan Limbah Cair. Surabaya.
- Arief, Barda Nawawi. 2005, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001 Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____, 2008, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
- Aristoteles. 2020, Politics, Indoliterasi Group, Yogyakarta
- Danusaputro, Munadjat. 1998, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung.
- Friedman, Lawrence M. 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, Newyork.
- Fuller, , Lon. L. 1969, The Morality of Law Revised Edition, Yale University, London.
- Hadjon, Philipus M. 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006, Konsep-Konsep, Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni
- Marzuki , Peter Mahmud. 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim, Emil. 2001, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta
- Silalahi, M. Daud. 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono.2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

_____. 2018, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Radjawali Press, Jakarta,

Soemarwoto, Otto. 2001, Ekologi, Lingkungan Hidup, Djambatan, Jakarta.

Waluyo, Lud. 2010, Teknik dan Metode dasar Dalam Mikrobiologi. UMM Press, Malang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6634).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 598)

MAKALAH

Asshiddiqie , Jimly. 2001. Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara HukumIndonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makalah dalam Masyarakat pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia (MaPPI-FHUI). Jakarta

Haprita , Anindya Dwi. 2019, Aspek Hukum Tata Kelola Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Studi Kasus Pembuangan Limbah B3 Secara Ilegal Di Kabupaten Karawang), Penulisan Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rangkuti, Siti Sundari. 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Ramadhan, Debi Dapri. 2020, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis pada Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19 (studi kasus pada RSUP. Dr. Sardjito), Penulisan Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Shulkhantika, Deyosi Faza. 2018, Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 (Studi Kasus Pengelolaan Limbah B3 oleh Job Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi), Penulisan Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ARTIKEL

Agus Surachman, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Yudho Taruno, “Effect of Globalization on Establishment of Water Resource Law: A Practice in Indonesia”, *International Journal of Economic Research*, Volume 14, Number 13 ,2017.

Alfiyan, Mokhamad, “Stategi Pengelolaan Limbah Radioaktif di Indonesia ditinjau Dari Konsep Cradle To Grave”. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN, Januari 2015.

Bappenas Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta.

Fitryanica, Agnes 2019, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," Gema Keadilan 6, no. 3.

Henry Campbell Black, 1991, Black Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul, Minn, West Publishing Co.

Ibrahim, Johannes and Sirait, Yohanes Hermanto , 2017, Konsepsi "Law as a Tool of Social Engineering" sebagai Upaya Manajemen Hukum dalam Menciptakan Kepastian Hukum. In: Konferensi Naional: Optimalisasi Community Well-Being dalam Perspektif Multidisipliner, 4-5 September, Bandung.

Suwandi Arham and Ahmad Saleh, 2019, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia," Petitum 7

Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020 , Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

INTERNET

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 3 Unsur Lingkungan Hidup, diakses dari <https://dlh.semarangkota.go.id/3-unsur-lingkungan-hidup/> tanggal 11 November 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, "fly ash dan Bottom Ash Hasil pembakaran Batubara wajib dikelola", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5864/fly-ash-dan-bottom-ash-faba-hasil-pembakaran-batubara-wajib-dikelola> pada tanggal 16 Desember 2022

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020, "Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, hanya Disederhanakan", diakses "<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan> pada tanggal 5 Maret 2023

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," Booklet, diakses <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>. Tanggal 23 May 2023

Kurniasih, "Pengertian Lingkungan Hidup, Unsur-unsur dan Arti Pentingnya bagi Kehidupan", diakses pada <https://klikhijau.com/pengertian->

lingkungan-hidup-unsur-unsur-dan-arti-pentingnya-bagi-kehidupan /
tanggal 12 Maret 2021

Law Insider, “Human environment definition”, diakses
<https://www.lawinsider.com>, pada 17 Juli 2022.

Lindungi Hutan, “Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis dan Manfaat
“, diakses dari <https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/>
tanggal 17 Juli 2022.

Sani, Christine, "Urgensi Pengelolaan Lingkungan setelah UU Cipta Kerja
Analisis Data Katadata",, diakses ,
[https://katadata.co.id/padjar/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-
pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja](https://katadata.co.id/padjar/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja) dpada 6 Maret 2023.

Suyatna, Bagong. “Pengertian narasumber Menurut Para Ahli Terlengkap
Beserta Tugas Maupun Syaratnya”, Dosen Pendidikan,
www.dosenpendidikan.com , diakses pada tanggal 9 Februari 2022,
pukul 15.19 WIB

WAWANCARA

Wawancara dengan Sayid Muadhdhan Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Limbah B3.

Wawanacara dengan Sugeng Priyanto Direktur Pengaduan, Pengawasan dan
Sanksi Administrasi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Wawanacara dengan Sugeng Priyanto Erni S,ST. MA Kepala Puskesmas
Pondok Kacang Timur.